



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SUYANTI
2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
3. NHK : 766825

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 513.500.000**

1. Tanah Seluas 2250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 2047 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 1036 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 5445 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
7. Tanah Seluas 2120 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
8. Tanah Seluas 1071 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 311.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000



3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000
4. MOBIL, HONDA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	39.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	867.100.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	867.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.